

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kompetensi Pegawai Dalam Mendukung Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Bkpsdm Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan SAP Berbasis Akrua di BKPSDM Kabupaten Cirebon Telah Berjalan Secara Terintegrasi dan Efektif. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrua di BKPSDM Kabupaten Cirebon telah berjalan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Seluruh transaksi keuangan dilaksanakan melalui mekanisme transfer langsung tanpa praktik penarikan uang tunai, dan seluruhnya tercatat dalam sistem SIPD sesuai modul penatausahaan. Realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,63% dari total anggaran sebesar Rp28.689.527.240,00, yang termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Efektivitas penerapan SAP secara keseluruhan berada pada persentase rata-rata 95,6% (kategori Sangat Tinggi/ST), ditopang oleh mekanisme pengawasan berlapis mulai dari verifikasi PPK-SKPD, rekonsiliasi bulanan, revid Inspektorat, hingga pemeriksaan tahunan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Kompetensi pegawai BKPSDM Kabupaten Cirebon dalam mendukung penerapan SAP berbasis akrua menunjukkan kondisi yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa kesenjangan kompetensi. Dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman dan kualifikasi, sebagian besar pegawai telah mampu melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrua. Namun demikian, masih ditemukan perbedaan tingkat pemahaman antarpegawai, terutama pada

pegawai yang belum mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis secara formal. Selain itu, implementasi SKKNI Nomor 264 Tahun 2023 sebagai standar kompetensi belum diterapkan secara optimal sehingga masih diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

3. Efektivitas penerapan SAP berbasis akrual di BKPSDM Kabupaten Cirebon berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat ketepatan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tingkat pemahaman pegawai terhadap SAP berbasis akrual, serta tercapainya tujuan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan secara efektif. Kompetensi pegawai terbukti menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan pelatihan bersertifikat dan gangguan teknis pada sistem, yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual di masa mendatang. Sebagian.

B. Implikasi

Hasil dari penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang penting bagi instansi pemerintahan, sebagai berikut:

1. Implikasi bagi Kebijakan Pengembangan SDM di BKPSDM Kabupaten Cirebon. Temuan kesenjangan kompetensi pada dimensi pengetahuan dan kualifikasi formal mengimplikasikan bahwa BKPSDM Kabupaten Cirebon perlu segera merancang ulang sistem manajemen kompetensi pegawainya. Penerapan SKKNI Nomor 264 Tahun 2023 sebagai acuan resmi dalam penilaian, rekrutmen, dan penempatan pegawai pengelola keuangan perlu menjadi kebijakan formal yang tertuang dalam regulasi internal instansi. Implikasi praktisnya adalah perlunya pemetaan kompetensi (competency mapping) seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, diikuti program pengembangan yang ditargetkan berdasarkan hasil pemetaan tersebut. Selain itu, setiap kegiatan

sosialisasi, bimbingan teknis, dan rapat teknis yang diselenggarakan BKAD harus disertai penerbitan sertifikat resmi agar rekam jejak kompetensi pegawai dapat terdokumentasi secara formal dan dapat dijadikan dasar perencanaan karir berbasis kompetensi.

2. Implikasi bagi Pemerintah Pusat dan Pengelola Sistem SIPD. Temuan mengenai instabilitas infrastruktur server SIPD yang menjadi kendala utama operasional mengimplikasikan bahwa pemerintah pusat selaku pengelola sistem SIPD secara nasional perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan keandalan server, terutama pada momen-momen kritis seperti awal tahun anggaran dan periode pelaporan semester. Implikasi teknisnya adalah perlunya peningkatan kapasitas server secara bertahap seiring bertambahnya jumlah pengguna dari seluruh daerah di Indonesia, pengembangan sistem redundansi (failover system), serta penyediaan jalur akses alternatif yang tidak bergantung pada satu titik server.
3. Implikasi bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi Syariah dan Ekonomi Islam. Penelitian ini menghasilkan implikasi teoritis yang signifikan bagi pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya dalam konteks akuntansi sektor publik. Temuan bahwa kesenjangan kompetensi tidak hanya berdimensi teknis-administratif tetapi juga berdimensi etis-teologis memperkuat relevansi pendekatan ekonomi Islam dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Prinsip amanah, ahliyyah (kapasitas), dan 'adalah (keadilan) terbukti dapat menjadi kerangka analisis yang sah untuk mengevaluasi kualitas aparatur pengelola keuangan publik. Implikasi akademisnya adalah perlunya integrasi nilai-nilai ekonomi Islam secara lebih sistematis dalam kurikulum pendidikan akuntansi pemerintahan, serta perlunya penelitian lanjutan yang mengkaji lebih dalam hubungan antara kompetensi aparatur, prinsip-prinsip syariah, dan kualitas tata kelola keuangan negara.

C. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi pihak-pihak yang terkait.

1. Saran kepada BKPSDM Kabupaten Cirebon. BKPSDM Kabupaten Cirebon perlu segera melakukan pemetaan kompetensi (competency mapping) menyeluruh bagi seluruh pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis akrual, dengan menggunakan SKKNI Nomor 264 Tahun 2023 sebagai kerangka acuan standar kompetensi. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dijadikan dasar penyusunan program pengembangan kompetensi yang terstruktur, bertahap, dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing jabatan. BKPSDM perlu mendorong pegawai pengelola keuangan untuk mengikuti program sertifikasi kompetensi resmi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi BNSP, sehingga kompetensi yang dimiliki dapat diakui secara nasional dan terdokumentasi secara formal.
2. Saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan BKAD. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon disarankan untuk mewajibkan penerbitan sertifikat resmi pada setiap kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan rapat teknis terkait SAP berbasis akrual yang diselenggarakan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengembangan kompetensi terdokumentasi secara formal dan dapat digunakan sebagai dasar penilaian kompetensi pegawai secara objektif. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pelatihan bersertifikat secara berkala bagi seluruh pegawai pengelola keuangan di setiap SKPD, bukan hanya BKPSDM, sehingga peningkatan kompetensi berlangsung secara merata dan sistemis.